Studi Komparatif Pemikiran Muhammad Syahrur dan David S. Powers Tentang Hukum Waris Islam

Muhammad Jazil Rifqi

UIN Sunan Ampel, Surabaya

muhammadjazilrifqi@uinsby.ac.id

Abstract: *The thought of Islamic law always develops along with changing times, places, and social conditions, and this cannot be separated from the approach applied by every scientist in performing ijihad. This article reveals a comparative study between Muhammad Syahrur and David S. Powers, who have different backgrounds in interpreting the law, especially inheritance. Syahrur has formal educational experience in the field of engineering. In turn, he studied Islam intensely, while Powers is indeed formally educated in the Islamic world, and although they both use different approaches, they almost have the same view. For Syahrur, there is no absolute specific percentage limit in wills, but the number of wills can be determined by the choices based on the best conditions, in his opinion. Likewise, with inheritance law, the 2: 1 rule for men and women is also not absolute. Under certain conditions, the distribution of property can be 1: 1. Meanwhile, Powers, this testamentary term, is increasingly related to Shahrur's inheritance. It is just that it is intended for heirs whom Ashabul Furudh blocks. Another term that Powers introduced was inheritance ab intestine which was no different from Shahrur's thought. However, it was valid for 2: 1 if the heir was in primary status and 1: 1 if the heir was in the second position.*

Keywords: *Inheritance Law; Muhammad Syahrur; David S. Powers.*

Abstrak: Pemikiran hukum Islam selalu mengalami perkembangan seiring perubahan masa, tempat dan kondisi sosial, tidak terlepas pula pendekatan yang diaplikasikan oleh setiap ilmuwan dalam berijtihad. Artikel ini mengungkap studi komparasi antara Muhammad Syahrur dan David S. Powers yang memiliki latarbelakang berbeda menafsirkan hukum, terutama masalah kewarisan. Syahrur memiliki latar belakang pendidikan formal pada bidang *engineering* meskipun pada gilirannya mempelajari keislaman secara mendalam, sementara Powers memang terdidik secara formal dalam dunia keislaman, dan meski keduanya menggunakan pendekatan yang berbeda, keduanya hampir memiliki pandangan

Komparatif:

Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam

Volume 1, Nomor 1, Juni 2021

yang sama. Bagi Syahrur, tidak ada batasan persentase tertentu yang mutlak dalam wasiat, melainkan jumlah wasiat dapat ditentukan oleh pewasiat berdasarkan kondisi yang terbaik menurutnya. Begitu juga dengan hukum waris, aturan 2:1 untuk laki-laki dan perempuan juga tidak mutlak, dalam kondisi tertentu pembagian warisan bisa menjadi 1:1. Sementara Powers, istilah “testamentair” ini semakna dengan pemikiran waris Syahrur, hanya saja diperuntukan kepada ahli waris yang terhalang oleh *ashāb al-furūd*. Term lain yang diperkenalkan Powers adalah waris *ab intestato* yang juga tidak berbeda dengan pemikiran Syahrur, namun berlakunya 2:1 jika pewaris berstatus primer dan 1:1 jika pewaris berstatus sekunder.

Kata Kunci: Hukum Waris; Muhammad Syahrur; David S. Power.

Pendahuluan

Fikih (*Islamic Jurisprudence*) berasal dari penafsiran dan ijtihad ulama yang lahir dari al-Qur’an dan hadis, yang tentu saja hasil pemikiran tersebut dimungkinkan berbeda karena diakibatkan berbedanya kondisi sosial, zaman dan landasan teoretiknya. Dari sini perkembangan pemikiran hukum Islam mengalami pelbagai dinamika seiring menjawab problematika umat pada masanya, sehingga lahir era tradisional, modern, serta postmodern. Penafsiran sumber hukum telah banyak dikaji para pemikir dan menghasilkan sebuah produk hukum, di antaranya berkaitan dengan wasiat dan waris yang dielaborasi oleh tokoh pembaharu Muhammad Syahrur dan David S. Power.

Syahrur, yang populer dengan teori batas (*theory of limits*), berupaya menjawab dinamika sesuai masanya dalam mengkritik dan merekonstruksi hukum waris Islam baik dari sisi sejarah, bahasa, dan berimplikasi pada hukumnya itu sendiri. Di antara pemikiran Syahrur mengenai waris dengan memberikan konklusi bahwa bagian 2 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan (2:1) tidak berlaku secara mutlak, namun antara laki-laki dan perempuan bisa memperoleh posisi yang sama 1:1 sesuai kondisi tertentu yang melingkupinya.¹ Berbeda dengan Syahrur, Powers, yang menegaskan pendapat Joseph Schacht terkait pelacakan hukum Islam yang memiliki kekaburan, berkeyakinan bahwa hukum waris Islam yang

¹ Afif Muamar, “Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur),” *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (December 14, 2017): 205–215, accessed June 30, 2021, <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49ce201fb73000e1c767b/rekonstruksi-hukum-waris-islam-telaah-pemikiran-muhammad-syahrur>.

berdasarkan al-Qur'an berbeda dengan sistem waris pada tradisi Islam atau yang diistilahkan *the proto Islamic of inheritance*.²

Kedua tokoh tersebut meneliti dan menemukan hukum waris berdasarkan metodenya masing-masing yang mereka anggap sebagai konstruksi pemikiran yang benar. Dengan menitikberatkan pada latar belakang masing-masing tokoh tersebut, teori dan landasan pemikirannya akan terungkap di mana Syahrur terkenal dengan konsep teori *hudūd*, sementara Power dengan teori *proto Islamic law* (hukum purwa Islam). Mengingat, Syahrur dikenal sebagai pemikir kontemporer yang berlatarbelakang ilmu teknik, namun seiring berjalannya waktu, beliau kemudian menggeluti dunia keislaman. Sementara Power adalah salah satu pemikir Barat (non-muslim) yang dari awal telah mendalami studi Islam.

Biografi Orientalis: Antara Syahrur dan Powers

Syahrur, bernama lengkap Muhammad Ibn Da'ib Syahrur, lahir di Shalihiyah Damaskus Suriah pada 11 April 1938. Ia merupakan putra kelima dari pasangan Deib Ibnu Deib Syahrur dan Ibunya bernama Siddiqah Binti Salih Filyun. Sementara Syahrur dikarunia lima orang anak: Tariq, al-Lais, Basul, Masun dan Rima, sebagai buah pernikahannya dengan Azizah.³ Tempat kelahirannya, Suriah, ini mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran keislaman, terutama masalah intelektual. Hal tersebut dibuktikan bahwa Suriah sangat memerhatikan dunia pendidikan dengan memberikan sejumlah beasiswa kepada para pelajar, yang menjadi jenjang awal Syahrur menempuh rihlah ilmiahnya.⁴ Setelah menyelesaikan sekolah pada 1957 di tingkat dasar dan menengahnya di Lembaga Pendidikan Abdurrahman al-Kawakibi, Syahrur melanjutkan pendidikannya dengan bantuan beasiswa setempat ke Moskow Uni Soviet di *Faculty of Engineering* untuk mengambil program diploma selama lima tahun pada Teknik Sipil (*Handasah Madānīyah*) dan lulus di tahun 1964.

² Safrudin Edi Wibowo, "Kritik Sejarah Dan Literasi Terhadap Hukum Waris Islam Dalam Pandangan David S. Powers," *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (January 22, 2014): 306–318, accessed June 30, 2021, <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/75>.

³ Achmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur* (Yogyakarta: aLSAQ Press, 2003), 43.

⁴ Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, 2nd ed. (Yogyakarta: LKiS, 2012), 93.

Tahun 1965 beliau pun kembali ke tempat kelahirannya dan mengabdikan diri dengan mengajar di Universitas Damaskus. Karena kegigihannya dalam menekuni bidang keilmuannya, Universitas meminta Syahrur untuk mendalami pengetahuannya dengan mengambil program Magister yang mampu diselesaikannya pada 1969 dan gelar Doktor pada bidang teknik sipil dengan spesialisasi mekanika tanah dan teknik bangunan (*soil mechanics and foundation*) di National Universitas of Irland, University Collage (*al-Jāmi'ah al-Qawmīyah al-Irlandiyah*) Dublin di Republik Irlandia pada 1972. Di tahun yang sama pula, ia kembali ke tempat pengabdiannya dengan mengampu mata kuliah Mekanika Pertanahan dan Geologi (*Mikānika al-Turbat wa ak-Mansya'at al-Ardīyah*). Selain mengajar, di Damaskus pula ia berkarir sebagai konsultan pada bidang di lembaga yang ia dirikan, *Dār al-Ishārāt al-Handasīyah*. Sekilas sejarah intelektual Syahrur ini menggambarkan bahwa ia sama sekali tidak pernah menempuh pembelajaran keislaman dan bergabung dalam Institusi Islam.⁵ Namun, kemudian pada tahun 1995, Syahrur juga pernah diundang menjadi peserta kehormatan dan terlibat dalam debat publik mengenai pemikiran keislaman di Libanon dan Maroko. Meskipun dasar pendidikan Syahrur adalah teknik, namun tidak berarti ia sama sekali kosong mengenai wacana pemikiran keislaman.⁶ Sebab akhirnya ia tertarik untuk mengkaji al-Qur'an dan Hadis secara lebih serius dengan pendekatan filsafat bahasa dan dibingkai dengan teori ilmu eksaktanya, bahkan ia juga menulis buku dan artikel tentang keislaman.⁷

Kajian Islam yang diusung berhaluan liberal tersebut membuatnya banyak dikecam oleh banyak cendekiawan, terutama di dunia Arab. Bahkan, tidak sedikit tuduhan kepadanya sebagai komunis, kafir, murtad, zionis, dan lain sebagainya. Namun, terlepas dari gagasan kontroversinya, pemikiran kritis, inovatif, dan liberal

⁵ Harda Armayant, "Mengenal Syahrur Dan Teori Batasnya," accessed May 30, 2021, <https://kajiantimurtengah.wordpress.com/2010/12/04/mengenal-syahrur-dan-teori-batasnya/>.

⁶ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya* (Yogyakarta: Islamika, 2003), 123.

⁷ Syahrur mulai konsen dengan kajian ilmu keislaman dimulai sejak di Dublin, Irlandia (1970-1980) ketika mengambil program magister dan doctoral. Disamping itu pertemuannya dengan Doktor Ja'far Dik al-Bab juga sangat berpengaruh dalam pengembangan ilmu-ilmu bahasanya. Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*, 124.

tersebut patut diapresiasi dalam wacana intelektual kontemporer.⁸ Buku pertamanya adalah *al-Kitāb wa al-Qur’ān: Qirā’ah Mu’āṣirah*, 1990. Buku ini merupakan pemikiran yang cukup panjang sekitar 20 tahun. Eikel Piscatori sebagaimana dikutip Bisri Efendi mengkritik secara tajam aturan konvensional dan keradikalan dalam agama yang menimbulkan intoleransi. Bertolak belakang dari pandangan hukum yang tidak sejalan dengan kepentingan mayoritas masyarakat inilah Syahrur berkeinginan untuk menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an secara komprehensif dengan menyesuaikan perkembangan generasi sekaligus membuka pintu ijtihad yang selama ini dapat dikatakan statis dalam memaknai al-Qur’an. Dalam hal ini Syahrur membuat maksim yang populer dengan *sabat al-nās wa tagayyur al-muhtawā*. Artinya, al-Qur’an itu teksnya tetap, tetapi muatan atau kandungan makna teks selalu dapat ditafsirkan secara dinamis.⁹

Buku keduanya, *Dirāsah Islāmīyah al-Mu’āṣirah fī al-Dawlah wa al-Mujtama’* (*Kajian Keislaman Kontemporer tentang Negara dan Masyarakat*). Syahrur mempublikasikan kajian pasca 1990-1994. Buku tersebut membahas konsepsi keluarga, umat, nasionalisme, bangsa, revolusi, kebebasan, demokrasi, permusyawaratan, Negara, totalitarianisme dan akibatnya, serta jihad.¹⁰ Buku ketiga, *al-Islām wa al-Īmān: Manzūmah al-Qiyām* (Islam dan Iman: Sistem Etika). Ini kajian Syahrur tahun 1994-1996. Buku setebal 375 halaman, diterjemahkan ke bahasa Indonesia, membahas konsepsi baru tentang Iman dan Islam serta rukunnya, amal saleh, sistem etika, dan politik. Kemudian *buku keempat, Naḥw Usūl al-Jadīdah li al-Fiqh al-Islāmī* (Metodologi Fikih Islam Kontemporer). Menyajikan kerangka teoritik fikih dalam mengatasi kejumudan dalam buku-buku fikih konvensional. Buku setebal 383 halaman ini hasil kajian Syahrur tahun 1996-2000, mengelaborasi pembahasan fikih yang seringkali didiskusikan secara ilmiah mengenai: wasiat, warisan, poligami, tanggung jawab keluarga, dan busana wanita.¹¹ Syahrur juga banyak menulis artikel di majalah dan jurnal, antara lain dapat dijumpai di *Muslim Politic Report* (14 Agustus 1997) dengan judul: “*The Devine Text and Pluralism in Moslem Societes*” dan “*Islam in the 1995 Beijing World Conference on Women*” dalam *Kuwait Newspaper*, dan lain

⁸ Muhyar Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam Di Dunia Modern* (Yogyakarta: LKiS, 2010), 320.

⁹ Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur’an Mazhab Yogya*, 124.

¹⁰ Fanani, *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam Di Dunia Modern*, 201.

¹¹ Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur’an Mazhab Yogya*, 124.

sebagainya. Artikel yang terakhir telah dimuat dalam buku *Liberal Islam* yang diedit Charles Kurzaman.¹²

David Stephan Powers, sebagai profesor Islamic Studies di Cornell University, menyelesaikan gelar B.A. pada 1973 di Yale University dan Ph.D. di Princeton University pada 1979, di mana ia mulai mengajar di tahun yang sama setelah menyelesaikan studinya di Cornell University. Berbeda dengan Syahrur yang sejak awal sama sekali tidak menggeluti keislaman, Powers, fokus penelitiannya berkaitan dengan kebangkitan Islam, sejarah hukum Islam serta implementasinya dalam masyarakat muslim. Ia salah satu pendiri dan pimpinan redaksi jurnal *Islamic Law and Society*.¹³ Tidak sedikit karya Powers dalam bidang yang ia geluti, di antara buku yang ia karang: (1) *Zayd* (University of Pennsylvania Press, 2014); (2) *Muhammad is Not the Father of Any of Your Men: The Making of the Last Prophet* (University of Pennsylvania Press, 2009); (3) *Law, Society, and Culture in the Maghrib, 1300-1500* (Cambridge University Press, 2002); (4) *Studies in Qur'an and Hadith: The Formation of the Islamic Law of Inheritance*, University of California Press, 1986. Translated into Bahasa Indonesia as *Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan: Kritik Historis Hukum Waris* (LKiS, Yogyakarta, 2001). Selain karya-karya tersebut Power juga banyak menulis artikel di jurnal-jurnal maupun di media lainnya.¹⁴

Konsep Wasiat dan Waris Menurut Syahrur

Menurut Syahrur Wasiat merupakan salah satu bentuk distribusi kekayaan yang dijalankan oleh seseorang setelah kematiannya untuk diberikan kepada pihak yang memiliki hak dengan ukuran tertentu sesuai dengan keinginan dan pertimbangan pribadinya.¹⁵ Wasiat, lanjutnya, tidak ada batasan bagian tertentu yang harus diikuti oleh pewasiat, di mana besaran dari persentase dalam wasiat sesuai keinginan dan pandangannya yang terbaik sesuai kondisi finansial pewasiat sendiri. Ia menggambarkan,

¹² Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*, 124.

¹³ Instructional and Web Services Technologies Cornell Information, "Bio Page for David S. Powers - Professor of Arabic and Islamic Studies and Adjunct Professor of Law," accessed March 6, 2021, <https://www.lawschool.cornell.edu/faculty/bio.cfm?id=59>.

¹⁴ "David Stephan Powers | Near Eastern Studies Cornell Arts & Sciences," accessed June 30, 2021, <https://neareasternstudies.cornell.edu/david-stephan-powers>.

¹⁵ Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ, 2004), 324.

misalnya, pewasiat adalah orang yang berkecukupan harta, maka cukup dengan meninggalkan harta bagi para pewarisnya. Sedangkan jika pemberi wasiat orang kaya, bisa jadi dapat mewasiatkan hartanya hingga 90% kemudian sisa hartanya yang 10% akan masih mencukupi untuk pembagian waris keluarganya. Jadi, batasan sepertiga, bagi Syahrur, bukan batasan yang tetap, mutlak, universal dan abadi.

Hal ini berlandaskan bahwa memang setiap orang memiliki hak untuk memberikan sebagian hartanya kepada siapa pun yang dikehendaki, bahkan kebebasan wasiat ini berlaku secara umum tanpa adanya batasan persentase dan jumlah tertentu, tetapi, pemberian wasiat tetap terikat dengan ketentuan Q.S. al-Nisa': 9.¹⁶ Syahrur juga menjelaskan perbedaan antara wasiat dan waris ini terletak di antara para pihak penerima, yaitu orang-orang yang disebut dalam ayat-ayat wasiat berjumlah lebih banyak dari orang-orang yang disebut dalam ayat-ayat waris¹⁷ dan seluruh pihak yang disebut dalam ayat waris juga ayat wasiat, tidak sebaliknya. Demikian pula, orang-orang miskin dan kerabat yang lemah tidak disebutkan dalam ayat-ayat waris, namun disebutkan dalam ayat wasiat.¹⁸

Perbedaan tersebut perlu dijelaskan arti waris secara mandiri, yang menurut Syahrur diartikan sebagai proses distribusi kekayaan yang dimiliki oleh orang yang telah wafat kepada pihak penerima dengan bagian jumlah dan ukuran yang sudah ditentukan dalam mekanisme pembagian waris, setelah pelaksanaan wasiat.¹⁹ Wasiat ini diutamakan atau diprioritaskan karena bisa jadi pewaris telah menentukan bagian warisan dalam wasiat atau mewasiatkan seluruh harta warisannya. Ia juga menjelaskan adanya kekeliruan dalam pembacaan ayat *li al-dhakar mithl haẓẓ al-unthayayn* (bagi seorang anak laki-laki semisal bagian dua anak perempuan) oleh mayoritas ahli fikih dalam pengaplikasiannya seakan-akan Allah berfirman: *li al-dhakar mithl haẓẓ al-unthayayn* (bagi anak laki-laki sama dengan dua kali bagian seorang anak perempuan).

Kemudian juga pada kata *awlād* Syahrur menjelaskan kata tersebut merupakan bentuk plural dari kata *walad* yang mencakup pengertian *maskulin* (anak laki-laki) maupun *feminine* (anak perempuan), karena dalam bahasa Arab tidak dijumpai bentuk

¹⁶ Ibid., 394.

¹⁷ Q.S. al-Nisa': 8.

¹⁸ Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, 324.

¹⁹ Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, 334.

feminine dari kata *al-walad*. Selain itu kata *walad* mencakup pengertian seluruh manusia yang hidup di dunia, karena pada dasarnya semua manusia hidup melalui proses kelahiran. Maka dari itu prinsip-prinsip waris yang menjadi target wasiat mencakup seluruh kemungkinan kasus pewarisan yang dialami oleh seluruh penduduk bumi, dan berlaku bagi setiap insan yang dilahirkan oleh dua orang tua, cucu (*al-ahfād*), suami-isteri (*al-azwāj*), dan saudara (*al-ikhwah*).²⁰

Dalam hal memahami hukum waris ini Syahrur menggunakan alat bantu ilmu matematis dan konsep variabel. Dengan rumus persamaan fungsi: $Y = f(x)$. Yang berarti bahwa “x” menempati posisi sebagai variabel peubah dan “y” sebagai variabel pengikut. Dalam hukum waris laki-laki disimbolkan dengan (y) sebagai variabel pengikut dan perempuan dengan simbol (x) sebagai simbol peubah. Dalam hal, ini perempuan adalah dasar dalam penghitungan waris, dan bagian laki-laki ditetapkan batasannya setelah bagian perempuan ditetapkan, karena sebagai variabel pengikut (y) nilainya berubah dan bergerak sesuai dengan perubahan bagian perempuan (x).²¹

Kaidah tersebut juga tidak terlepas dari teori *Hudūd* yang diusungnya agar hukum Islam mampu menyesuaikan dinamika dan elastisitas dengan zaman dan tempat dalam batas-batas tertentu,²² di mana teori Syahrur tersebut mengandung dua gerakan, yaitu gerakan konstan dan gerakan dinamis, yang tentu saja tetap berada dalam bingkai batas-batas hukum Allah.²³ Hal ini, menurutnya, didukung dalam Q.S. al-Nisa’ ayat 13 *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حُدُودَ اللَّهِ* (itulah batas-batas hukum Allah) dan Q.S. al-Nisa’ ayat 14 *وَلَا تَتَعَدَّ حُدُودَهُ* (dan melanggar batas-batas hukumnya). Jadi, ruang ijtihad, baginya, terbuka secara luas selama berada dalam batas-batas hukum Allah, dan lafal *Hudūd* tersebut berbentuk plural sehingga batasan-batasan yang dikehendaki bukan tunggal. Kemudian lafal *ta’addi* (pelanggaran) adalah redaksi yang bermakna penempatan hukum yang telah melampaui batas hukum Allah.

Batas-batas hukum waris dalam ayat waris, menurut pemikirannya, telah menjelaskan perolehan batas bagian maksimal bagi laki-laki dan batas minimal bagi perempuan. Ilustrasinya, bila

²⁰ Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, 338–339.

²¹ Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, 341.

²² M. Amin Abdullah, *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2020), 142.

²³ Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer*, 194.

beban keluarga secara penuh (100%) ditanggung oleh laki-laki, sedang pihak perempuan sama sekali tidak menanggung beban (0%), maka dalam kondisi seperti ini batasan hukum Allah dapat diaplikasikan, yaitu dengan memberikan dua bagian kepada laki-laki dan satu bagian untuk perempuan. Jadi, persentase bagi perempuan adalah 33,3%, sedang bagi laki-laki maksimal 66,6%. Sehingga, jika laki-laki diberikan besaran sejumlah 75% dan perempuan 25%, maka hal tersebut melanggar batasan yang telah ditetapkan Allah. Tapi, jika warisan dibagi 60% untuk laki-laki dan untuk perempuan 40%, maka penerapan ini tidak melanggar batas hukum Allah, sebab masih berada di antara batasan-batasannya.²⁴

Konsep di atas dapat berlaku berbeda dengan beberapa pertimbangan pemikiran tersebut juga dapat berlaku berbeda dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu terhadap penerima warisan dengan mengimplementasikan prinsip "mendekat" antara dua batasan tersebut yang berlaku menjadi titik keseimbangan antar keduanya, di mana ada persamaan jumlah antara laki-laki dan perempuan dengan mendapat persentase masing-masing 50%.²⁵ Bagi Syahrur, posisi batas maksimal dan minimal bersamaan ini telah ditetapkan dalam al-Qur'an, namun wilayah ijtihad adalah naik-turun antara keduanya. Dalam Surat al-Nisa' ayat 11, seperti dijelaskan di atas, menjelaskan perbandingan maksimal bagi laki-laki dan minimal bagi perempuan adalah 2:1 dengan perbandingan persentase 66,6% : 33,3%. Prinsip yang berlaku dalam masalah waris adalah *al-tāriq* atau kecenderungan untuk saling mendekat hingga pada batas perbandingan yang seimbang antara laki-laki dengan perempuan, yakni 1:1 atau masing-masing memperoleh persentase 50% : 50%.²⁶

Tabel. 1. Pembagian harta waris dalam Surat al-Nisa': 11.

Pewaris	Bagian	Prosentase	Posisi <i>Hudūd</i>	Kondisi
Anak Laki-laki	2/3	66,6%	Batas Maksimal	Seorang diri dan hanya memiliki seorang saudara perempuan
Anak Perempuan	1/3	33,3%	Batas Minimal	Seorang diri dan hanya memiliki

²⁴ Muhammad Syahrur, *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: eLSAQ, 2007), 39.

²⁵ *Ibid.*, 40–41.

²⁶ Syamsuddin, *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*, 163.

				seorang saudara laki-laki
Dua Anak Perempuan atau lebih	2/3	66,6%	Batas Minimal	Jika anak semuanya perempuan lebih dari dua
Satu anak perempuan	1/2	50%	Batas Minimal	Seorang diri
Bapak	2/3	66,6%	Batas Maksimal	Jika yang meninggal tidak memiliki anak
Ibu	1/3	33,3%	Batas Minimal	Jika yang meninggal tidak memiliki anak
Bapak	1/3	33,3%	Batas Maksimal	Jika yang meninggal mempunyai beberapa saudara
Ibu	1/6	16,6%	Batas Minimal	Jika yang meninggal memiliki beberapa saudara
Bapak dan ibu	@ 1/6	16,6%	Batas Minimal & Maksimal	Jika yang meninggal memiliki anak

Tabel. 2. Pembagian harta waris dalam surat al-Nisa': 12.

Pewaris	Prosentase	Posisi <i>Hudūd</i>	Kondisi	
Suami	½	50%	Batas Minimal	Jika yang meninggal (istri) tidak memiliki anak
Suami	¼	25%	Batas Maksimal	Jika yang meninggal (istri) memiliki anak
Istri	¼	25%	Batas Minimal	Jika yang meninggal (suami) tidak memiliki anak
Istri	1/8	12,5%	Batas Minimal	Jika yang meninggal (suami) memiliki anak
Saudara lk/pr seibu	@ 1/6	16,6%	Batas Minimal	Jika yang meninggal tidak memiliki anak dan ayah (<i>Kalālah</i>)

Dua saudara atau lebih	1/3 (bersama)	33,3%	Batas Minimal	Jika saudara seibu lebih dari seorang
------------------------	---------------	-------	---------------	---------------------------------------

Tabel. 3. Pembagian harta waris dalam surat al-Nisa': 176.

Pewaris_x0007_	Posisi <i>Hudud</i>	Kondisi		
Saudara perempuan	1/2	50%	Batas Minimal	<i>Kalālah</i> , tidak memiliki anak
Saudara Laki-laki	1	100%	Batas Maksimal	<i>Kalālah</i> , tidak memiliki pasangan, anak atau kedua orang tua
Dua saudara perempuan	2/3	66,6%	Batas Minimal	Saudara perempuan dua orang
Sdr. Laki-laki lebih dari seorang	2/3	66,6%	Batas Maksimal	Jika jumlah saudara laki-laki banyak
Sdr. Perempuan lebih dari seorang	1/3	33,3%	Batas Minimal	Jika jumlah saudara perempuan banyak.

Konsep Wasiat dan Waris Menurut David S. Power

Sejarah telah memberi pemahaman bahwa hukum Islam telah muncul pada abad pertama hijriah ketika diutusnya Nabi Muhammad. Untuk itu, bagi Power dalam meneliti sekaligus memahami awal mula pertumbuhan hukum Islam tentu harus menempatkan al-Qur'an sebagai titik tolak dan landasannya dalam penggalan produk hukum. Ketika mengkaji ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis tentang waris, Power melihat ada tiga tahap perkembangan hukum waris. Pertama, periode Makkah (610-622M) setidaknya ada enam ayat yang mengatur waris testamentair (wasiat hukum) yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Kedua, setelah hijrahnya Nabi ke Madinah pada tahun 622 M, yang menerima wahyu dalam penetapan aturan wajib berkaitan dengan pembagian waris

(*farā'id*). Ketiga, pasca *Fath al-Makkah* pada tahun 630, di mana Nabi menjelaskan harus adanya pembatasan dalam memberikan wasiat.²⁷

Telaah secara historis tersebut, Power menyimpulkan, yang mana ilmu *al-Farā'id* yang keberadaannya diyakini oleh kalangan Islam, bukanlah hukum waris yang semata-mata turun kepada Nabi Muhammad, melainkan hasil dari pergumulan politik, sosial, dan pendapat para sahabat dan ulama. Hal ini dikarenakan bahwa hukum purwa Islam (waris masa Nabi Muhammad) memberikan kekuasaan yang penuh kepada *testamen* (calon almarhum) untuk menunjuk siapa saja sebagai ahli waris *testamentair* dan menyerahkan hartanya sesuai dengan keputusannya. Para kerabat yang seharusnya memperoleh bagian warisan (*Furūd*) harus tetap diberi warisan sebagai kompensasi atas pembatalan hak waris mereka.²⁸

Mengenai kewarisan *testamentair*, Power menawarkan pembacaan alternatif dalam penunjukan ahli waris, yaitu pada Q.S. al-Nisa' ayat 12 tentang makna *kalālah* sebagai kerabat perempuan yang meliputi pengantin perempuan, menantu perempuan atau saudara ipar (*a female in law*). Redaksi kata *kalālah* ini, bagi Power, setara dengan kata *imra'ah* yang memiliki arti istri. Sehingga *kalālatan aw imra'atan* dapat diterjemahkan sebagai istri atau menantu (perempuan.²⁹ Disini ada tiga kata yang menjadi perhatian Power dalam Q.S. al-Nisa': 12, yaitu kata *يُورِثُ* *yūrath* (bentuk pasif), *أَمْرَأَةً* *imra'atun* (sebagai pelaku) dan *يُوصِي* *yūṣā* (bentuk pasif). Apa yang diubah pembacaannya menjadi *يُورِثُ* *yūrith* (bentuk aktif), *أَمْرَأَةً* *imra'atan* (sebagai objek) yang diartikan sebagai "istri", dan *يُوصِي* *yūṣī* (bentuk aktif). Maka arti ayatnya menjadi:

'... jika seseorang laki-laki (calon almarhum) menunjuk sebagai pewaris (*yūrith*) seorang menantu perempuan (*kalālah*) atau istri (*imra'atan*), dan laki-laki itu memiliki seorang saudara atau saudari, maka setiap orang dari keduanya memperoleh seperenam. Jika mereka lebih banyak dari itu, maka mereka bersekutu dalam sepertiga, sesudah penunaian wasiat yang laki-laki itu wasiatkan (*yūṣī*) atau hutang, dengan tidak menimbulkan mudharat...'³⁰

²⁷ Waryani Fajar Riyanto, *Studi Hukum Waris Islam Klasik, Modern, Dan Postmodern* (Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2012), 152.

²⁸ Ibid., 153.

²⁹ David S. Powers, *Peralihan Kekayaan Dan Politik Kekuasaan Kritik Historis, Hukum Waris* (Yogyakarta: LKiS, 2001), 52.

³⁰ Riyanto, *Studi Hukum Waris Islam Klasik, Modern, Dan Postmodern*, 157.

Hukum kewarisan *testamentair* ini mengizinkan bagi orang yang akan meninggal untuk putra, putri, kerabat sedarah, atau bahkan kerabat dari jalur perkawinan dari suami atau istri, tetapi pada kasus terakhir, kerabat yang semestinya mendapat warisan diberi bagian sebagai kompensasi hilangnya hak waris. Pembuat wasiat juga boleh, dalam Q.S al-Baqarah ayat 180, mewasiatkan dengan jumlah sepertiga warisan dari hartanya kepada bapak, ibu atau kerabat dekat lainnya. Agar testamen ini menjadi legal, maka wasiat harus disusun atau ditulis di hadapan dua orang saksi yang adil (Q.S. al-Maidah ayat 105-106). Baginya, mengubah bagian-bagian yang telah ditentukan dalam pembuatan testamen tersebut tidak diperbolehkan, dan jika terjadi ketidaksepakatan antara ahli waris, maka penyelesaiannya perlu adanya bantuan dari pihak ketiga (Q.S. Al-Baqarah: 181-182).

Selain *testamentair*, Powers juga menawarkan hukum kewarisan *an intestato* yang dapat diterapkan ketika tidak ada pesan terakhir serta adanya testamen yang legal. Sehingga, ahli waris yang memperoleh bagian hanya kerabat sedarah almarhum (Q.S. al-Nisa' ayat 8), sementara suami atau istri tidak saling mewarisi, terkecuali pada kasus di mana suami belum memberikan mahar pada istrinya saat pernikahan. Ahli waris dibagi dalam kelas-kelas yang berbeda, anak-anak, ibu-bapak, dan saudara/saudari, seperti yang ditetapkan dalam Q.S. al-Nisa': 11, dan 176. Tiga unit ini menggambarkan penerapan hukum *ab intestato* pada sejumlah kasus terpilih. Perbedaan dapat ditarik antara ahli waris primer yang mewarisi antara 50 sampai 100 persen warisan dan ahli waris sekunder yang mewarisi maksimal sepertiga warisan. Putera-puteri almarhum selalu menjadi ahli waris primer. Sedangkan ibu-bapak dan saudara/saudari bisa menjadi ahli waris primer maupun ahli waris sekunder, tergantung konstelasi warisnya.³¹

Dalam aturannya, Powers menyebut bahwa prinsip laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan jika berada dalam status pewaris primer, sementara jika berada dalam status pewaris sekunder maka perbandingannya tetap satu berbanding satu. Sebagai contoh misalnya seseorang meninggal (almarhum), meninggalkan putera, ibu dan bapak. Maka ibu dan bapak masing-masing mendapat seperenam (1/6) warisan, sementara puteranya mewarisi dua pertiga (2/3) yang menjadi sisanya. Pada kasus ini ibu

³¹ Powers, *Peralihan Kekayaan Dan Politik Kekuasaan Kritik Historis, Hukum Waris*, 134.

dan bapak berbagi sepertiga warisan yang disediakan bagi ahli waris sekunder berbasis sama rata, mengabaikan jenis kelaminnya, suatu kontradiksi terhadap prinsip “seorang laki-laki berhak atas bagian dua orang perempuan”.³² Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel. 4. Untuk Pembagian Anak-Anak dan Ibu-Bapak

Putra-putra	Putri-Putri	Bagian	Ibu-Bapak	Bagian	
Satu	Semua	x	x	x	X
Satu	2/3	satu	1/3	x	X
Satu	1/2	dua	masing-masing 1/4	x	X
Dua	masing-masing 1/2	x	x	x	X
Dua	masing-masing 2/5	satu	1/5	x	X
Satu	2/3	x	x	Keduanya	masing-masing 1/6
Satu	4/9	satu	2/9	Keduanya	masing-masing 1/6
Satu	2/6	dua	masing-masing 1/6	Keduanya	masing-masing 1/6
Dua	masing-masing 2/6	x	X	Keduanya	masing-masing 1/6
Dua	masing-masing 4/15	satu	2/15	Keduanya	masing-masing 1/6

Kasus berikutnya misalnya seorang meninggal, meninggalkan ibu dan ayah sebagai ahli warisnya. Dalam al-Qur’an (Q.S al-Nisa’:11) menyatakan bahwa ibu mewarisi sepertiga (1/3), dan al-Qur’an menyerahkan kepada pembaca untuk dengan gampang memastikan bapak memperoleh bagian dua pertiga (2/3) berdasarkan prinsip “seorang laki-laki memperoleh bagian dua orang perempuan”. Untuk keterangan selanjutnya perhatikan tabel dibawah ini.

Tabel. 5. Untuk Pembagian Ibu-Bapak dan Saudara/Saudari

³² Powers, *Peralihan Kekayaan Dan Politik Kekuasaan Kritik Historis, Hukum Waris*, 120–121.

Ahli Waris Primer_Waris Sekunder					
Ayah	Semua	x	x	x	X
Ayah	2/3	ibu	1/3	x	X
X	X	ibu	1/2	x	X
Ayah	1/2	x	x	Saudara	½
Ayah	1/3	ibu	1/6	saudara	½
Ayah	1/3	x	x	2 saudara	masing-masing 1/3
Ayah	1/3	ibu	1/6	2 saudara	masing-masing 1/4
Ayah	1/3	x	x	3 saudara	masing-masing 2/9
Ayah	1/3	ibu	1/6	3 saudara	masing-masing 1/6

Untuk kasus berikutnya jika seseorang meninggal, dan meninggalkan ibu, bapak, dan saudara sebagian ahli warisnya, maka pembagiannya adalah sebagai berikut:

Tabel. 6. Untuk Pembagian Saudara/Saudari

Saudara-saudara_x0007_saudari	Bagian		
Satu	Semua	X	X
Dua	masing-masing 1/2	X	X
Satu	2/3	satu	1/3
Dua	masing 2/5	satu	1/5
Satu	1/2	dua	masing-masing ¼
X	X	satu	½
X	X	dua	masing-masing 1/3

Penutup

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa Muhammad Syahrur dan David S. Power merupakan dua tokoh pemikir kontemporer yang telah mengusung teori baru mengenai wasiat dan waris. Keduanya mempunyai konsep tersendiri dalam menafsirkan ayat-ayat wasiat dan waris. Syahrur dalam mengkaji

ayat-ayat al-Qur'an menggunakan pendekatan linguistik, menelusuri makna kata Arab sebagaimana berlaku menurut konteks waktu, sehingga menghasilkan interpretasi baru terhadap pemahaman lama yang dianggap benar. Dalam hal wasiat dan waris ini Syahrur lebih menggunakan ilmu analisis matematik yakni dengan teori batas (*hudūd*). Meski demikian pemikiran kedua cendekiawan tersebut tidak jauh berbeda, bahkan saling mengisi satu sama lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pembatasan berbentuk apapun terhadap kemutlakan wasiat dan pengkhususan berbentuk apapun terhadap keumumannya dan cakupannya yang luas, serta perubahan apapun terhadap hukum waris, maka semua itu merupakan ijihad lokal kondisional yang tidak memiliki sifat permanen.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2020.
- Armoyant, Harda. "Mengenal Syahrur Dan Teori Batasnya." Accessed May 30, 2021. <https://kajiantimurtengah.wordpress.com/2010/12/04/mengenal-syahrur-dan-teori-batasnya/>.
- Fanani, Muhyar. *Fiqh Madani: Konstruksi Hukum Islam Di Dunia Modern*. Yogyakarta: LKiS, 2010.
- Instructional and Web Services Technologies Cornell Information. "Bio Page for David S. Powers - Professor of Arabic and Islamic Studies and Adjunct Professor of Law." Accessed March 6, 2021. <https://www.lawschool.cornell.edu/faculty/bio.cfm?id=59>.
- Ismail, Achmad Syarqawi. *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*. Yogyakarta: aLSAQ Press, 2003.
- Muamar, Afif. "Rekonstruksi Hukum Waris Islam (Telaah Pemikiran Muhammad Syahrur)." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (December 14, 2017): 205–215. Accessed June 30, 2021. <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb49ce201fb73000e1c767b/rekonstruksi-hukum-waris-islam-telaah-pemikiran-muhammad-syahrur>.
- Mustaqim, Abdul. *Epistimologi Tafsir Kontemporer*. 2nd ed. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Powers, David S. *Peralihan Kekayaan Dan Politik Kekuasaan Kritik Historis, Hukum Waris*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Riyanto, Waryani Fajar. *Studi Hukum Waris Islam Klasik, Modern, Dan Postmodern*. Pekalongan: STAIN Pekalongan Press, 2012.

- Syahrur, Muhammad. *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ, 2004.
- . *Prinsip Dan Dasar Hermeneutika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: eLSAQ, 2007.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika Al-Qur'an Mazhab Yogya*. Yogyakarta: Islamika, 2003.
- Wibowo, Safrudin Edi. “Kritik Sejarah Dan Literasi Terhadap Hukum Waris Islam Dalam Pandangan David S. Powers.” *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman* 4, no. 2 (January 22, 2014): 306–318. Accessed June 30, 2021. <http://islamica.uinsby.ac.id/index.php/islamica/article/view/75>.
- “David Stephan Powers | Near Eastern Studies Cornell Arts & Sciences.” Accessed June 30, 2021. <https://neareasternstudies.cornell.edu/david-stephan-powers>.